

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI KE UPT ASRAMA HAJI EMBARKASI BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022-2023 31 MARET 2 APRIL 2023



SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI JAKARTA 2023

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
BAB II	PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA	8
BAB III	TEMUAN DAN REKOMENDASI	10
BAB IV	PENUTUP	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 membentuk tim kunjungan kerja spesifik ke UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

B. Dasar Kunjungan Kerja

Pelaksanaan kunjungan kerja spesifik ke UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada:

- 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang tugas DPR RI di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan
- Pasal 98 Ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diubah sebanyak tiga kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.
- 3. Keputusan DPR RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang wewenang dan tugas DPR RI.
 - b. Pasal 59 Ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan.
- 4. Keputusan rapat internal Komisi VIII DPR RI.

C. Tujuan

- Secara umum untuk memperoleh informasi mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M di Embarkasi Bekasi, Jawa Barat.
- Secara khusus untuk mendapatkan data mengenai kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Bekasi dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M.

D. Objek Kunjungan

Objek kunjungan kerja spesifik ini adalah ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Bekasi di Jalan di Jalan Kemakmuran No. 72 Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

E. Jadwal

NO	HARI/ TANGGAL	ACARA/KEGIATAN	KET		
	JUMAT, 31 MARET 2023				
1.	08.30 WIB	Anggota tim kunker spesifik sudah berkumpul di Komisi VIII DPR RI Jakarta	Tim sekretariat Komisi VIII DPR RI		
2.	09.00 WIB	Rombongan tim kunker spesifik berangkat dari DPR RI menuju ke UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Menggunakan kendaraan pribadi		
3.	09.30 WIB	Tiba di UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi di Jalan Kemakmuran No. 72 Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat	Protokol Kantor Kanwil Kemenag Jabar		
4.	10.00 – 11.30 WIB	Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Kemenag Kota Bekasi, Kepala Kemenag Kabupaten Bekasi, dan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi beserta jajarannya. Tema:	Tempat: Di Aula UPT Asrama Haji Bekasi Dihadiri Pejabat Ditjen PHU Kemenag RI		
		Persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 H di Embarkasi Bekasi			

5.	11.30 – 13.00 WIB	Istirahat dan sholat Jumat		
6.	13.00 WIB	Peninjauan pelatihan petugas haji kloter Provinsi Jawa Barat		
7.	14.30 WIB	Menuju ke hotel untuk istirahat di Bekasi		
8.	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma		
		SABTU, 1 APRIL 2023		
9.	09.30 WIB	Menuju ke Kantor Kemenag Kota Bekasi		
10.	10.00 – 12.30 WIB	Peninjauan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023		
11.	12.30 – 13.30 WIB	Ishoma		
12.	13.30 WIB	Menuju ke hotel untuk istirahat		
13.	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma		
AHAD, 2 APRIL 2023				
14.	10.00 WIB	Kembali ke Jakarta		

Catatan:

Jadwal disesuaikan dengan kondisi di lapangan

Set Komisi VIII DPR RI : (021) 5715399, Fax (021) 5715512

Agus Widijatmoko : 0812-9884-5088

Email : set_komisi8@dpr.go.id

F. Tim Kunjungan Kerja

NOMOR				FRAKS	
URUT	ANGT	NAMA	JABATAN	I	DAPIL
1.	289	Dr. TB H. Ace Hasan Syadzily, M.Si	Ketua Tim	PG	JABAR II
2.	107	Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA	Wkl. Ketua	PDIP	JATIM II
3.	218	Ina Ammania	Anggota	PDIP	JATIMVII
4.	154	I Komang Koheri, SE	Anggota	PDIP	LAMPUNG II
5.	172	Selly Andriany Gantina, A.Md	Anggota	PDIP	JABAR VIII
6.	225	M. Hasbi Asyidiki Jayabaya	Anggota	PDIP	BAN TEN I
7.	298	Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., MM	Anggota	PG	JABAR IX
8.	346	Dra. Hj. Idah Syaifdah Ruslie Habibie, MH	Anggota	PG	GORONTALO
9.	62	M. Husni, SE., MM	Anggota	Gerindr a	SUMUT I
10.	89	Obon Tabroni	Anggota	Gerindr a	JABAR VII
11.	366	Drs. Tjetjep Muchtar Soleh, MM	Anggota	Nas Dem	JABAR III
12.	377	H. Ach.Fadil Muzakki Syah, S.Pd.	Anggota	Nas dem	JATIM III
13.	4	H.Maman Imanul Haq	Anggota	PKB	JABAR IX
14.	28	MF. Nurhuda	Anggota	PKB	JATENG X
15.	559	H. Hasani Bin Zuber, S.IP	Anggota	PD	JATIM XI
16.	434	Hj. Nur Azizah Tamhid, MA	Anggota	PKS	JABAR VI
17.	438	Dr. KH. Surahman Hidayat, MA	Anggota	PKS	JABAR X
18.	-	Agus Widijatmoko, SH	Kasubag	Sekreta	riat Komisi VIII

19.	-	Bambang Kriswanto, SH	Staf	Sekretariat Komisi VIII
20.	-	Mardiyana	Staf	Sekretariat Komisi VIII
21.	-	Mohammad Hasyim, M.Si.	TA	Sekretariat Komisi VIII
22.	-	Edi Hayat, S.Ag.,MA	TA	Sekretariat Komisi VIII
23.	-	Jody Pratama Putra	Staf	Sekretariat Komisi VIII
24.	-	Muhammad Rizki Nugroho	Metaksos	Setjen DPR RI

BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

Pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi dan Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi dilakukan dengan mengadakan pertemuan dan peninjauan.

A. Pertemuan

Komisi VIII DPR RI mengadakan pertemuan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Pada pertemuan ini, Komisi VIII DPR RI mendapat penjelasan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, antara lain, sebagai berikut:

- Kuota haji Provinsi Jawa Barat untuk tahun 1444 H/ 2023 M sebanyak 38.723 jemaah. Rinciannya adalah: 38.296 jemaah (36.361 jemaah tahun berjalan dan 1.935 jemaah lanjut usia) dan 424 petugas (291 petugas haji daerah dan 136 pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah).
- 2. Petugas haji kloter Provinsi Jawa Barat untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/ 2023 M adalah sebanyak 483 orang. Rinciannya adalah: ketua kloter laki-laki sebanyak 91 orang, ketua kloter perempuan sebanyak 5 orang, pembimbing ibadah kloter laki-laki sebanyak 78 orang, pembimbing ibadah kloter perempuan sebanyak 18 orang, petugas haji daerah laki-laki untuk bimbingan ibadah sebanyak 61 orang, petugas haji daerah perempuan untuk bimbingan ibadah sebanyak 14 orang, petugas haji daerah laki-laki untuk kesehatan sebanyak 35 orang, petugas haji daerah perempuan untuk kesehatan sebanyak 25 orang, petugas haji daerah laki-laki untuk layanan umum sebanyak 131 orang, dan petugas haji daerah perempuan untuk layanan umum sebanyak 27 orang.
- 3. Rencana perjalanan haji untuk Embarkasi Bekasi adalah kloter pertama berangkat ke Madinah pada tanggal 24 Mei 2023 dan kloter terakhir kembali tiba di Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2023.
- 4. Embarkasi pemberangkatan haji untuk jemaah dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 ada dua: Embarkasi Bekasi untuk 20 kabupaten/kota dengan jumlah jemaah sebanyak 29.555 orang dan Embarkasi Indramayu untuk 7 kabupaten/kota (Kab. dan Kota Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu, Kab. Kuningan, Kab. Subang, dan Kab. Sumedang).

5. Fasilitas layanan yang disiapkan di UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi adalah: akomodasi, konsumsi, kesehatan, dan pusat perbelanjaan kebutuhan haji.

B. Peninjauan

- 1. Peninjauan terhadap pelatihan petugas kloter jemaah haji Provinsi Jawa Barat tahun 1444 H/2023 M yang dilaksanakan di UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi. Secara umum, pelaksanaan pelatihan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Harapannya, petugas kloter, pada saat melaksanakan tugas, dapat memberikan layanan yang maksimal kepada jemaah haji.
- 2. Peninjauan terhadap persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M di Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi. Kementerian Agama Kota Bekasi telah pro aktif melakukan sosialisasi mengenai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) kepada jemaah haji. Selain itu, Kementerian Agama Kota Bekasi juga telah berkoordinasi dengan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU), bank penerima setoran (BPS), dan imigrasi untuk mempercepat pelunasan BPIH dan penyelesaian paspor jemaah.

BAB III

TEMUAN DAN REKOMENDASI

A. Temuan

- UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi Provinsi Jawa Barat belum ramah terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia. Misalnya, untuk menuju ke aula pertemuan di lantai 2 hanya dapat diakses melalui tangga, tidak tersedia lift.
- Di UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi Provinsi jawa Barat belum tersedia mock up pesawat. Padahal, mayoritas jemaah haji yang berangkat dari Embarkasi Bekasi berasal dari desa dan belum familiar dengan pesawat.
- Di antara jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat yang akan berangkat pada tahun 1444 H/2023 M adalah lanjut usia, yaitu sebanyak 1.935 orang.

B. Rekomendasi

- Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi hendaknya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk mengupayakan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia di lingkungan asrama haji.
- 2. Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi seyogiyanya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk mengupayakan penyediaan fasiltas mock up pesawat. Tujuannya adalah untuk memberi gambaran kepada jemaah haji mengenai fasilitas yang tersedia di pesawat.
- 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat harus memastikan bahwa semua petugas haji tahun 1444 H/2023 M, baik kloter maupun non kloter, ramah terhadap jemaah haji lanjut usia.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Harapannya, laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kunjungan kerja, temuan, dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi.

KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI